BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi termuda di Indonesia telah mencatat beberapa prestasi pembangunan namun tidak dipungkiri masih terdapat berbagai macam permasalahan pembangunan yaitu:

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan di Sulawesi Barat

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	MDG's	1. Mengurangi tingkat kematian anak 2. Meningkatkan kesehatan ibu 3. Hiv/AIDS dan penyakit menular 4. Kelestarian Lingkungan (Untuk mencapai target MDGS's masih diperlukan kerja keras)	1. Peningkatan pelayanan proses persalinan dan perbaikan gizi ibu hamil 2. Peningkatan intensitas pemahaman perilaku hidup sehat 3. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dan penyakit menular 4. Menumbuhkembangkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan
2	Sarana dan prasarana teknologi	Belum dapat mengikuti perkembangan globalisasi informasi yang diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi	Dibangunnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan sumber daya manusia sebagai pendukung
3	SDM Aparatur	Belum optimalnya sumber-sumber daya dalam mendukung terselenggaranya otonomi daerah	Peningkatan SDM aparatur melalui Diklat dan kursus-kursus singkat serta sistem penerimaan pegawai perlu di sempurnakan sesuai

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			kebutuhan daerah
4	SDM Masyarakat	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM	1. Penyempurnaan sitem pendidikan 2. Peningkatan kesehatan masyarakat 3. Perbaikan gizi masyarakat
5	Keterbatasan lembaga perlindungan ibu dan anak	Masih rendahnya pelayanan dan perlindungan ibu dan anak serta penyandangan masalah kesejahteraan sosial lainnya	Menumbuhkembangkan lembaga perlindungan ibu dan anak serta masalah sosial lainnya
6	Sarana dan prasarana paud	Masih rendahnya akses dan pelayanan pendidikan anak usia dini	Meningkatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana PAUD
7	Angka buta huruf	Masih diperlukan penuntasan angka buta huruf	Meningkatkan program penuntasan angka buta huruf melalui pelaksanaan kegiatan paket A,B,C
8	Pembinaan kepemudaan dan olahraga	Belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan prestasi olahraga dan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan kelembagaan pemuda dan olahraga
9	Komoditas unggulan daerah	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan daerah	Mengembangkan industri yang berbasis produk unggulan daerah
10	Jaringan transportasi	Belum terbangunnya secara menyeluruh jaringan transportasi antar wilayah sebagai penunjang kemajuan perekonomian daerah	Membangun jaringan transportasi antar wilayah sebagai penunjang kemajuan perekonomian daerah
11	Energi listrik	Masih terbatasnya energi	Membangun pembangkit

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		listrik dalam menunjang seluruh aktivitas baik untuk rumah tangga dan industri serta perkantoran	listrik tenaga air sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah
12	Wilayah perbatsan dan pulau terpencil	Belum terwujudnya pembangunan di wilayah perbatasan, terpencil dan kepulauan secara baik dan berkeadilan	Membangun wilayah perbatasan, terpencil dan kepulauan secara baik dan berkeadilan
13	Good governance	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip Good Governance	Dilaksanakan pembenahan dalam mencapai optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip Good Governance
14	Sumber Daya Alam	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan program pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan
15	Mitigasi bencana	Belum optimalnya penanganan mitigasi bencana pada daerah-daerah rawan bencana	Meningkatkan program penanganan mitigasi bencana pada daerah-daerah rawan bencana
16	Air bersih dan sanitasi lingkunan	Akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak	Meningkatkan program Akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak

Berdasarkan pada kondisi tersebut berikut disusun telaahan dinamika internasional, nasional dan regional yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 4.2
Telaahan Dinamika Internasional, Nasional dan Regional
yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat

No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
1.	Pencapaian MDG's	Pencapaian MDG's	Pencapaian MDG's
	Tujuan pembangunan Milenium terdiri dari 8 (delapan) tujuan pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi pengentasan kemiskinan ekstrim, yang harus dicapai pada tahun 2015 oleh 189 Negara yang menandatangani rumusan Deklarasi Milenium pada September tahun 2000 termasuk Indonesia. Untuk mencapai tujuan MDGs tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Sulawesi Barat pada khususnya.		
2.	Pemanasan Global	Pemanasan Global	Pemanasan Global
	Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh mahluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor dan pabrik-pabrikmodern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.		
3.	Globalisasi Informasi	Globalisasi Informasi	Globalisasi Informasi
	Peningkatan teknologi informasi menuntut kemampuan lebih untuk dapat mengambil manfaat dari derasnya arus globalisasi sehingga diperlukan mutu modal manusia. Disisi lain diperlukan filterisasi dari setiap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya sehingga dapat mencegah pengaruh negatif dari globalisasi informasi		
4.	-	Otonomi Daerah	Otonomi Daerah
	Berlakunya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan kekayaan dan pemerintahan daerahnya masing-masing. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan		

No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
	menjamin terkelolanya sumberdaya alam secara maksimal dalam rangka pemerataan, keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI.		
5.	-	-	Optimalisasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi
	Dominasi sektor-sektor primer dalam perekonomian wilayah Sulawesi menunjukkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan. Sementara keragaman komoditas unggulan antar daerah memungkinkan dikembangkannya gugus (cluster) industri unggulan secara simultan.		
6.	-	-	Interkonektivitas domestik intrawilayah
	Integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian KBI dan KTI.		
7.	-	-	Kualitas SDM dan Tingkat Kemiskinan
	Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM provinsi-provinsi di Sulawesi yang berada di bawah 20, kecuali Sulawesi Utara. Tingkat kemiskinan relatif tinggiditemui di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.		
	Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Regional**
8.	-	-	Kapasitas energi listrik
	Ketersediaan energi listrik saat ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Peningkatan kapasitas energi listrik sangat strategis dalam menunjang arah pengembangan gugus industri unggulan di wilayah Sulawesi.		
9.	-	-	Revitalisasi modal Sosial
	Peningkatan rasa saling percaya di antara masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program- program pembangunan. Meningkatnya rasa saling percaya juga berperan memperlancar kerja sama produktif, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat ketahanan social masyarakat dalam menghadapi isu-isu sensitif.		

No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
10.	-	-	Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil
	Pengamanan kawasan perbatasan dengan daerah-daerah (Kab/Kota dan Provinsi) dan Negara-negara tetangga sangat penting selain untuk peningkatan kerjasama antara daerah/wilayah/negara, juga terdapat potensi potensi konflik yang cukup tinggi. Keterisolasian dan kesenjangan tingkat kesejahteraan di kawasan perbatasan juga berpotensi mengikis nasionalisme masyarakat yang selanjutnya bisa mengancam kedaulatan wilayah nasional.		
11.	-	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola
	Aparat pemerintah daerah yang profesional disertai pelayanan publik yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik lokal maupun asing. Selanjutnya, meningkatnya investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pelayanan publik yang efisien juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.		
12.	-	-	Konservasi SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana
	- Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna baik di Asia maupun Australia. - Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam.		

4.2 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Barat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun Regional.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan daerah pada Bab II dan keuangan daerah pada Bab III serta memperhatikan dinamika internasional, nasional dan regional, maka diidentifikasi isu strategis Provinsi Sulawesi Barat, sebagai barikut berdasarkan urusan pemerintahan (PP 38 tahun 2007):

Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Kualitas dan Kuantitas guru masih rendah dan pendistribusiannya tidak merata di setiap tingkatan pendidikan
b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan disetiap tingkatan pendidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
c. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas di setiap tingkatan pendidikan
d. Anggaran pendidikan yang masih relatif kecil
e. Masih rendahnya pelayanan PAUD Penguasaan
f. Pengembangan IPTEK yang masih rendah

2. Kesehatan

a. Masih tingginya Angka Kematian bayi dan Ibu
b. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan
c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
e. Belum terpenuhinya jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
f. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
g. Belum otimalnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat esensial penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaran pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
h. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
i. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan data dan informasi kesehatan.

3. Pekerjaan Umum

a. Masih rendahnya kapasitas jalan provinsi
b. Belum tersusunnya perencanaan data base jalan berbasis GIS
c. Belum tersusunnya data base berbasis GIS
d. Belum terpublikasinya data base yang dapat diakses melalui internet

e. Belum adanya perencanaan data base berbasis Web.GIS
f. Belum adanya data base yang dapat diakses melalui internet
g. Rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dan pusat produksi serta industri
h. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi
i. Masih terjadinya abrasi dan belum berkembangnya potensi wisata Pantai
j. Masih terjadinya banjir
k. Tingkat keamanan bangunan waduk untuk menampung air yang rendah
l. Masih tingginya pantai yang terkena abrasi
m. Belum tersedianya data dasar daerah irigasi berbasis Web.GIS
n. Pemanfaatan yang masih minim hasil perencanaan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan daerah irigasi
o. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan air irigasi
p. Masih rendahnya kesempatan masyarakat bekerja pada sektor pertanian
q. Masih kurangnya sarana dan prasarana jaringan irigasi
r. Kurang efektif dan efisiennya penggunaan air irigasi
s. Belum terjaminnya keberlanjutan pemanfaatan jaringan irigasi
t. Masih rendahnya Kualitas dan Kuantitas personil PNS di Wilayah Sulawesi Barat
u. Pengendalian Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

4. Perumahan

a. Masih terdapat rumah rakyat yang tidak layak huni
b. Terbatasnya alokasi pembiayaaan perumahan bagi masyarakat tidak mampu
c. Rendahnya kualitas kawasan permukiman berbasis tata ruang
d. Rendahnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh /nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

5. Penataan Ruang

a. Masih rendahnya kualitas jalan yang berbasis tata ruang
b. Belum adanya sistem jaringan jalan yang andal berbasis tata ruang
c. Belum tersedianya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
d. Belum tersedianya Perda Rencana Detail dan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
e. Belum tersedianya Pedoman Pelaksanaan Bidang Penataan Ruang

f. Rendahnya Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
g. Rendahnya Pemanfaatan Kawasan Strategis Provinsi
h. Belum terlaksananya penggunaan teknologi canggih di dalam pelaksanaan penataan ruang
i. Belum konsistennya kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Program dan kegiatan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Tata Ruang
j. Masih rendahnya Pembinaan Penataan Ruang
k. Rendahnya kualitas bangunan dan kawasan perkantoran pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat berbasis tata ruang
l. Belum terbangunnya Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang Serta Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat

6. Perencanaan Pembangunan

a. Tidak terintegrasinya dengan baik perencanaan antar daerah yang ada, baik di antar provinsi serta Provinsi dan Kabupaten
b. Belum rampungnya RT RW
c. Masih kurangnya Kualitas sumber daya manusia
d. Manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai
e. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja SKPD
f. Sistem pengumpulan dan akurasi data masih belum optimal
g. Koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar SKPD masih belum optimal

7. Perhubungan

a. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu lalu lintas, pagar pengaman maupun marka jalan Nasional
b. Terbatasnya pendanaan untuk membiayai sarana dan prasaran perhubungan, baik laut, darat maupun udara
c. Di bidang transportasi darat adalah turunnya kualitas pelayanan umum, baik di bidang angkutan darat maupun di bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan, serta angkutan jalan dan angkutan kota seperti polusi dan kondisi armada yang sudah melampaui umur ekonomisnya terutama angkutan bus kota dan moda angkutan lainnya. Di samping itu terjadi penurunan disiplin berlalulintas dan tumpang tindih

kewenangan penanganan angkutan jalan dan angkutan kota oleh pelbagai instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

d. Di bidang transportasi laut adalah rendahnya pangsa armada pelayaran nasional, baik angkutan dalam negeri maupun luar negeri. Kesiapan penyediaan sarana transportasi laut perlu didukung dengan ketersediaan prasarana pokok dan fasilitas penunjang transportasi laut yang memadai. Dewasa ini diperlukan kebijakan khusus di bidang transportasi laut untuk turut menunjang tetap tegaknya kedaulatan NKRI khususnya di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan negara lain

e. Di bidang transportasi udara Kebijakan membuka pasar (multi operator) bagi kegiatan transportasi udara belum mampu menarik minat maskapai untuk membuka jalur penerbangan ke Sulawesi Barat.

8. Lingkungan Hidup

a. Permasalahan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya presepsi masyarakat terkait isu lingkungan hidup dimana masalah lingkungan masih belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi

b. Kapasitas sumber daya aparatur, kelembagaan maupun sarana prasarana yang masih minim ditambah dengan jumlahnya yang masih terbatas

c. Masalah pembiayaan yang terbatas sehingga beberapa indikator kinerja dilakukan dengan pembiayaan pusat melalui dana dekonsentrasi sehingga sasaran objek capaian belum memenuhi sasaran objek dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

d. Beberapa indikator seperti Peresentase penduduk berakses air minum dan Persentase luas pemukiman yang tertata dilakukan oleh instansi lain yang juga merupakan mitra bersama dalam urusan wajib lingkungan hidup, dalam hal ini dilakukan oleh instansi Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tarkim.

9. Pertanahan

a. Masih banyaknya tanah tanpa sertifikat yang berada di Prov. Sulbar

b. Masih banyak tanah adat yang mesti diperjelas status kepemilikannya

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP

b. Masih terdapat bayi yang belum memiliki akta kelahiran

11. Pemberdayaan Perempuan

a. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) utamanya pada Indeks Pembanguan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender masih sangat rendah.

b. Masih rendahnya keterlibatan perempun atau kesetaraan gender dalam jabatan politik dan jabatan publik
c. Perempuan masih mengalami diskrimansi dalam memperoleh akses pendidikan dan keterampilan oleh karena itu angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas didominasi oleh kaum perempuan
d. Masih kuranganya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses, manfaat serta kontrol dalam pembangunan akibatnya kemiskinan lebih banyak diderita perempuan daripada laki-laki
e. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan cukup tinggi dan juga separuh dari perempuan mengalami asupan gizi yang kurang
f. Prevalensi kekerasa terhadap perempuan dan anak masi sangat tinggi
g. Masih rendahnya anak untuk memperoleh akses pendidikan utamannya pada pendidikan dasar
h. Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi dan asupan gizi yang kurang.
i. Kekerasan dan diskrimanasi masih sering dialami oleh anak-anak
j. Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat tingginya angka kelahiran

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Tingginya angka kelahiran disebabkan oleh masih rendahnya penggunaan alat kontrasespsi
b. Kualitas dan produktifitas remaja masih rendah

13. Sosial

a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas
b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,
c. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran
d. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri
e. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal

f. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih kurang
g. koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal
h. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehjahteraan sosial, dana, sarana dan Prasarana

   Faktor-faktor yang mempengaruhi:
   - Masih rendahnya partisipasi aparatur dalam mengikuti, pendidikan dan pelatihan pmks
   - Minimnya Pengetahuan pengurus kelembagaan sosial yang menangani masalah
   - Minimnya ketersediaan dana dalam menanggulangi penyandang Masalah kesejahteraan sosial
   - Masih mininnya sarana dan prasarana penyandang Masalah kesejahteraan sosial
i. Faktor Keluarga, Masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam

   Faktor-faktor yang mempengaruhi :
   - Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga
   - Tinggi angka keluarga miskin
   - Kurang kepedulian masyarakat terhadap PMKS
j. Terbatasnya Political will terhadap penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.Kebijakan pemerintah dalam hal penanggulan PMKS belum optimal

14. Tenaga Kerja

a. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai
b. Sarana dan prasarana pendukung tenaga kerja terutama BLK belum memadai serta output dari BLK belum sepenuhnya mampu untuk mandiri
c. Masih kurangnya pegawai teknis dan Fungsional dalam melaksanakan Pelatihan, penempatan, penyelesaian kasus dan pengawsan ketenagakerjaan
d. Belum terbangunya Gedung dan Sarana Prasanaran UPTD BLK, BPPD dan Balatrans provinsi Sulawesi Barat sebgai tempat peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat
e. Belum lengkapnya sarana prasarana dan Sumber daya manusia yang akan mengelola Bursa kerja On Line berupa Indeks pencari kerja dalam pencapaian penempatan tenaga kerja di sektor informal
f. Pembentukan LKS Bipartit antar pengusaha dan Serikat pekerja belum maksimal,

karena belum semua perusahaan di Sulawesi Barat memiliki PP/PKB dan serikat pekerja di perusahaan

g. Pengawasan Ketenagakkerjaan belum maksimal disebabkan masih minimnya sarana prasarana pemeriksaan K3 di lapangan serta masih minimnya pengetahuan perusahaan skala kecil menengah akan pentingnya penerapan SMK3 di Perusahaan

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan menumbuhkan Koperasi menjadi prioritas, namun kenyataannya masih banyak Koperasi yang tidak aktif
b. Pengembangan UKM belum didukung oleh pengoptimalan peningkatan SDM para pelaku usaha, olehnya itu gerakan penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru bagi lulusan sarjana (P2SW) harus dimaksimalkan
c. Belum kuatnya terbangun komitmen antara Pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
d. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan menumbuhkan Koperasi menjadi prioritas, namun kenyataannya masih banyak Koperasi yang tidak aktif
e. Pengembangan UKM belum didukung oleh pengoptimalan peningkatan SDM para pelaku usaha, olehnya itu gerakan penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru bagi lulusan sarjana (P2SW) harus dimaksimalkan

16. Penanaman Modal

a. Data potensi penanaman modal
b. Iklim investasi di Provinsi Sulawesi Barat
c. Pelayanan perizinan
d. Pengawasan dan pengendalian PMA dan PMDN
e. Tidak maksimalnya tugas-tugas promosi diakibatkan oleh kurangnya data potensi daerah serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas-tugas promosi
f. Pengolahan potensi Penanaman Modal Daerah belum optimal karena kurangnya anggaran dalam Pendayagunaan Fasilitas Pengembangan Usaha
g. Lemahnya Pelayanan Penanaman Modal diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dan pembinaan terhadap dunia usaha serta belum tersedianya standar operasional pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal
h. Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN diakibatkan belum adanya acuan berupa perda

17. Kebudayaan

a. Pelestarian Seni dan Budaya
b. Kurang terawatnya dokumentasi sejarah kebudayaan termasuk peninggalannya
c. Mulai lunturnya nilai-nilai budaya daerah
d. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian Seni Budaya, Situs dan kawasan cagar budaya sehingga terdapat beberapa kawasan yang belum mendapat perhatian pemerintah

18. Pemudaan dan Olah Raga

a. Masih terbatasnya dana untuk pembinaan olahraga dan pembinaan kepemudaan
b. Pengembangan potensi, kreatifitas dan keterampilan pemuda
c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Atlet di berbagai cabang olahraga prestasi
d. Pengangguran pemuda produktif masih tinggi disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki
e. Prestasi di bidang Olahraga masih kurang dikarenakan pembinaan terhadap cabang olahraga prestasi belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah meskipun telah dilaksanakan pembinaan pada cabang olahraga tertentu

19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik
b. Kurangnya fasilitas infrastruktur politik
c. Masih kurangnya kemandirian dan kinerja infrastruktur politik
d. Pembangunan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Sekretariat Daerah)

a. Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas masih perlu ditingkatkan
b. Belum optimalnya Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
c. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum esuai dengan beban kerja
d. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setia punit kerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal
e. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
f. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan DIBALE (Dinas,Badan, danLembagaTeknis) belum berjalan secara proporsional

g. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa
b. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan
c. Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal
d. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal
e. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perdesaan cenderung menurun
f. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal
g. Peran perempuan dalam pembangunan desa belum optimal
h. Kemampuan keuangan desa dalam menopang pembangunan masih terbatas
i. Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib

22. Kearsipan

a. Perlu segera membuat Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
b. Diperlukan komitmen dari para pemangku kebijakan untuk segera mengalih fungsikan tenaga pengelola arsip ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan tenaga pengelola Perpustakaan ke dalam jabatan Fungsional Pustakawan

23. Komunikasi dan Informatika

a. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak tahu publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
b. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal
c. Kelembagaan komunikasi dan informatika masih lemah

<u>Urusan Pilihan</u>

24. Ketahanan Pangan

a. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
b. Peningkatan kemudahan dan kemampuan masyarakat mengakses pangan
c. Peningkaan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis

pada pangan lokal

d. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

25. Pertanian

a. Masih terbatasnya pemasaran untuk memasarkan hasil produksi pertanian
b. Masih rendahnya nilai tambah yang di dapatkan oleh para petani
c. Terbatasnya Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan
d. Terbatasnya SDM yang berkompetensi di Sektor Pertanian dan Peternakan
e. Terbatasnya Prasarana dan Sarana pendukung
f. Sistem Perbenihan dan Perbibitan yang belum berjalan optimal
g. Pengelolaan Kawasan/Lahan Pertanian dan Peternakan yang belum berjalan optimal
h. Minimnya pengetahuan dalam pengolahan hasil – hasil pertanian dan peternakan
i. Pengelolaan Akses Pemasaran produk hasil pertanian dan peternakan
j. Metode pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak yang belum optimal
k. Minimnya pengelolaan pasca panen hasil pertanian dan peternakan.

26. Kehutanan

a. Status Kawasan Hutan yang belum mantap
b. Masih tingginya Tekanan dan gangguan Keamanan Hutan serta Illegal logging
c. Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
d. Produktifitas hasil hutan yang masih rendah
e. Diversifikasi Produk hasil hutan yang masih minim
f. SDM Aparatur dan Anggaran kehutanan yang masih kurang
g. Kelembagaan Kehutanan yang belum mapan.Belum adanya RT RW kawasan hutan
h. Jumlah Sumberdaya Manusia Aparatur yang dimiliki masih sedikit
i. Masih minimnya alokasi anggaran
j. Kepastian dan pelayanan usaha di bidang kehutanan masih rendah
k. Pemberian akses terhadap kebijakan dan informasi kehutanan rendah
l. Peraturan perundangan bidang kehutanan belum sepenuhnya dapat diterapkan
m. Terbatasnya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan
n. Tata batas kawasan hutan masih banyak yang belum temu gelang dan kawasan hutan masih belum berfungsi sesuai peruntukannya menyebabkan status kawasan hutan belum mantap
o. Alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan semakin meningkat

p. Cara pandang personil kehutanan belum semuanya mengikuti perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang baru
q. Masil luasnya kerusakan hutan termasuk Illegal logging merupakan dampak dari lemahnya pengawasan hutan di lapangan
r. Penegakan hukum kehutanan masih lemah
s. Selain masih adanya Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme (KKN), vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan masih ringan dan tidak menimbulkan efek jera

27. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Penambangan tanpa izin
b. Kurangnya pasokan Listrik
c. Mitigasi bencana alam geologi
d. Minyak dan Gas Bumi
e. Pemetaan Sumber Daya Geologi,Tatalingkungan, Mineral dan Batu Bara
f. Pengembangan dan Monitoring Bidang Minyak dan Gas Bumi
g. Belum optimalnya ekploitasi pada pertambangan dan pengeboran SDA
h. Rendahnya pemanfaatan dan Pengembangan Energi Terbarukan

28. Pariwisata

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
b. Belum terealisasinya dengan optimal kawasan wisata
c. Pengembangan destinasi, sarana dan pemasaran pariwisata serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Wisata
d. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata domestik dan internasional, hal ini disebabkan karena masih kurangnya perhatian untuk pengembangan daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata serta masih kurangnya promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri, hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PDRB

29. Kelautan dan Perikanan

a. Masih sederhananya teknologi yang digunakan oleh para nelayan sehingga produktivitas masih rendah
b. Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta wilayah perairan lainnya di sulawesi barat, dengan segala potensi dan permasalahan yang ada, belum dioptimalkan pemanfaatannya baik dari aspek penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran,

serta pengawasan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelolanya, dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat

c. Kondisi ekosistem seperti ekosistem terumbu karang berada pada kisaran rusak sampai kritis di semua wilayah pesisir dan ketebalan formasi mangrove yang tipis (Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat). Kondisi ini sangat memprihatinkan, olehnya itu diperlukan upaya maksimal dan secepat mungkin dalam mengatasi masalah tersebut, sebab bila tidak, bukan saja kita kehilangan sumber keanekaragaman plasma nutfah, ekosistem pendukung kehidupan dan penyangga sumber daya pangan, tapi juga hampir semua penduduk yang bermukim di wilayah pesisir terancam kehilangan mata pencaharian

d. Masyarakat pesisir belum semuanya memahami permasalahan dalam hal mengakses modal melalui perkreditan di Bank

e. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan:
   - Belum lengkapnya data tentang keadaan awal masyarakat (tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, keterampilan serta perilaku masyarakat) untuk mengukur tingkat kesejahteraannya;
   - Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal karena berbagai proses revisi yang memerlukan waktu yang cukup lama;
   - Jumlah dan kapasitas Tenaga Pendamping belum memadai untuk mendukung pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian;

f. Belum adanya laboratorium pengujian analisis residu dan ikan sakit di Sulawesi Barat, sehingga analisis dilakukan di daerah lain

g. Sebagian besar kegiatan dilaksanakan di akhir-akhir tahun karena menunggu revisi DIPA akibat banyaknya kesalahan penempatan rekening di sebagian belanja kegiatan

h. Kurang akuratnya data kelompok usaha perikanan budidaya akibatnya identifikasi dan inventarisasi kelompok penerima bantuan membutuhkan waktu yang lama

i. Terlambatnya proses pengelolaan keuangan sehingga program dan kegiatan kurang optimal

j. Kurangnya Tenaga Profesional dalam KKMB

k. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas

l. Kurangnya pelatihan bagi petugas Statistik Kab/kota

m. Tidak ada sarana (kendaraan roda dua) untuk

n. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dan organisasi masyarakat masih perlu ditingkatkan mengingat kompleksnya permasalahan terutama berkaitan dengan baseline data, informasi yang akurat dan komprehensif terutama yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya Kelautan untuk kesejahteraan masyarakat

o. Salah satu Prasarana vital yang belum ada dan sangat mendukung keberhasilan pelaksaan tugas adalah kapal patroli pengawasan selama ini perikanan di dinas provinsi Sulawesi Barat masih sangat terbatas, para pengawas yang melakukan tugas kepengawasan masih menggunakan (Menyewa) perahu nelayan yang daya jangkauannya sangat terbatas

p. Permasalahan pada sumber daya manusia , adalah terbatasnya pengawas di bidang Kelautan dan Perikanan baik Provinsi maupun kabupaten, selain itu tingkat pengetahuan dan pemahaman juga masih terbatas

q. Masalah Kelembagaan berkaitan dengan lembaga kepengawasan yang masih minim baik secara formal maupun yang bersumber dari kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat pengawas di wilayah sulawesi barat. Jumlah Pokmaswas yang aktif sampai dengan tahun 2011 berjumlah 6 kelompok

r. Masalah Perijinan pada sektor perikanan yang terdiri atas :
   - Belum adanya data yang akurat tentang, surat isin penangkapan ikan (SIKPI) yang telah diterbitkan oleh kabupaten
   - Belum adanya data yang akurat tentang, surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) yang telah diterbitkan oleh Kabupaten Kota
   - Belum adanya data yang akurat tentang jumlah kapal sesuai dengan besaran tonase kapal yang diukur dengan GT kapal dalam aturan yang ada menyebutkan bahwa kapal perikanan di bawah 30 GT isin operasinya ditentuklan oleh Gubernur atau badan yang diberi hak untuk mengeluarkan. kabupaten kota diberikan mengeluarkan surat izin terrsebut apabila tonase kapal di bawah 10 GT

s. Berbagai permasalahan diperairan Sulawesi Barat lebih diwarnai oleh aktivitas penangkapan dengan menggunakan Bom dan Bius (bahan kimia Lainnya), Penebangan hutan Mangrove, Pencemaran perairan, dan perburuan Satwa yang dilindungi serta aspek pelanggaran tindak pidana perikanan baik dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan dari luar wilayah Sulawesi Barat.

30. Perdagangan

a. Komoditi daerah kita yang merupakan komoditas ekspor melimpah, namun sampai saat ini pemerintah daerah belum melaksanakan perdagangan ekspor
b. Kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku rotan, memberi peluang untuk menumbuhkan industri pengolahan rotan didaerah yang memiliki bahan baku
c. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum optimal
d. Belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif
e. Kebijakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik
f. Penggunaan alat teknologi tepat guna bagi IKM masih rendah
g. Legalitas dan kepastian hukum usaha belum optimal
h. Masih rendahnya daya saing produk daerah
i. Ketatnya persyaratan mutu dari negara pengimpor terutama menyangkut penerapan GMP, HACCP, ISO dan SANITARY

31. Perindustrian

a. Pemanfaatan pengolahan komoditi daerah belum optimal, disebabkan karena Pembangunan industri yang akan menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan produktifitas tinggi belum ada
b. Belum adanya kawasan industri yang diatur dalam RT RW
c. Persaingan di era globalisasi pasar bebas semakin meningkat
d. Prasarana infrastruktur belum memadai

32. Ketransmigrasian

a. Belum optimalnya bimbingan dan penyuluhan kepada para transmigran
b. Masih banyaknya lokasi areal transmigrasi yang belum kategori 2C (Clean and Clear) karena masuk dalam kawasan Hutan Lindung dan HPK
c. Perkembagan Unit Permukiman Transmigrasi yang dibina di Sulawesi Barat terkendala Aksesbilitas Jalan dan Sarana Prasarana pemsaran untuk pengembangan ekonomi warga transmigrasi serta pemberdayaan pembina UPT bina di setiap Lokasi yang belum maksimal dalam menagani permasalahan warga UPT di Lokasi sehingga perlu peningkatan Kapasitas SDM pembina UTP di Setiap Lokasi

33. Perkebunan.

a. Kurangnya koordinasi/kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten
b. Rendahnya nilai jual/mutu hasil perkebunan
c. Tanaman Relatif Tua yang mempengaruhi penurunan produksi
d. Adanya Kombun dalam Kawasan Hutan

e. Masih banyaknya Lahan Potensial yang belum dikelola
f. Belum Optimalnya Cara Pemupukan dan penanggulangan OPT
g. Kurangnya Sarana Produksi
h. Belum adanya Industri Pengolahan hasil
i. Kurangnya akses ke sentra Produksi
j. DISBUN tidak memiliki peta permasalahan secara spasial dan termutakhirkan
k. Penurunan produktivitas dan mutu produksi komoditas perkebunan
l. Nilai tambah dalam proses produksi hingga pasca panen dan pengolahan hasil
m. Keberadaan komoditas perkebunan dalam kawasan hutan
n. Degradasi lingkungan
o. Kebijakan Pemprov-Pemkab yang tidak sinkron, tidak terkoordinasi dan kapasitas yang rendah
p. Kapasitas petani dan kelembagaannya yang rendah
q. Infrastruktur belum memadai
r. Sistem pemasaran komoditas perkebunan belum kompetitif
s. Konversi lahan perkebunan
t. Tuntutan sustainabilitas, keamanan bagi kesehatan & penyelamatan lingkungan
u. Perbaikan kapasitas SDM, sarana perkantoran & kelembagaan DISBUN
v. Akses dan kerjasama Poktan– Koperasi dengan lembaga keuangan belum terbangun
w. Tenaga serta sistem penyuluhan dan pendampingan yang belum mendukung Prioritasi komoditas unggulan perkebunan SULBAR.